

Rumah Budaya Tunjang Pariwisata

PARLEMENTARIA

H. Ali Akbar AS, SH

Pontianak, BERKAT.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) merencanakan akan membangun perkampungan budaya (rumah budaya), rencana perlu didukung semua pihak, dan tak perlu dipolemikkan.

Pasalnya, keberadaan rumah budaya itu selain akan menjadi aset pemprov, juga diyakini dapat menunjang pembangunan pariwisata daerah. Disatu sisi, tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, HM Ali Akbar AS SH menegaskan itu, lantaran adanya pro kontra di kalangan anggota DPRD Kalbar terhadap rencana pembangunan rumah budaya senilai Rp 23 Milyar dari APBD.

"Kami berharap pembangunan rumah budaya itu, nantinya bukan hanya satu etnis saja, tapi multi etnis," tegas Ali

persatuan melalui budaya, sekaligus menunjang pariwisata.

Bukan itu saja, juga akan menambah pemasukan PAD. Bila perkampungan budaya itu dikelola swasta dengan manajemen profesional. Apalagi sarana dan prasarana yang ada dapat disewakan untuk umum, sebagai ajang promosi atau seminar.

Kendati menilai, anggaran sebesar Rp 23 Milyar itu merupakan sebuah pemborosan. Tapi, bila rumah budaya sudah dibangun, tentu akan menjadi aset Pemprov Kalbar.

Diketahui, pembangunan rumah budaya itu ada dualisme. Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kalbar sebagai pelaksanaan proyek pembangunan, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Kalbar sebagai dinas pengusul.

"Agar dikemudian hari tak ada masalah, sebelum dibangun kami

Akbar. Sehingga, lanjut politisi PPP ini, kawasan perkampungan budaya itu, benar-benar menggambarkan

sarankan Dinas PU dan Disbudpar agar berkonsultasi dengan BPK," saran Ali yang juga anggota Komisi C. Pasalnya, menyangkut anggaran milyaran rupiah yang bersumber dari APBD.

Secara terpisah, Sekretaris Partai Golkar DPRD Kalbar, Andry Huda Wijaya SH, menjelaskan, sesuai hasil pembahasan di Dewan, pembangunan rumah budaya itu, memang masuk dalam program Dinas PU senilai Rp 23 Milyar.

"Herannya, kenapa tidak masuk dalam program Disbudpar. Karena dinas ini ada kaitan dengan program pembangunan pariwisata," tegas Andry dengan nada tanya.

Kalau anggaran sebesar Rp23 Milyar itu diusulkan Dinas PU, menurut dia, memang tak logis. Sebenarnya instansi ini dapat saja memanfaatkannya untuk program infrastruktur dan lingkungan. Apalagi di PU sendiri, masih banyak program yang memerlukan dana termasuk membangun infrastruktur.

"Herannya lagi, kenapa Dinas PU memprioritaskan membangun rumah budaya," tegas Andry yang juga Sekretaris Komisi D. Menurut politisi Partai Golkar ini, seharusnya membangun



rumah budaya itu masuk dalam program Disbudpar.

Menurut dia lagi, akan sangat baik, pembangunan rumah budaya itu merupakan program Disbudpar, yang dibuat dalam Rencana Induk Pariwisata (RIP) biar ada kejelasan. Kendati Kalbar belum memiliki RIP tersebut.

Kalau Disbudpar yang usulkan rumah budaya, tentu kita lihat dulu," tegas Andry. Pasalnya, apakah pembangunan rumah budaya itu akan menimbulkan sektor ril atau tidak. Mengingat anggarannya cukup besar Rp 23 Milyar dari uang rakyat. (mzr)